

## Peran Pengendalian Internal Terhadap *Fraud Triangle*

Amelia (ameliakarista20@gmail.com, Erti Karista

*Universitas Maritim Raja Ali Haji*

### ABSTRACT

*Internal control is one of the means used to evaluate the effectiveness of the management of a company. The purpose of internal control can be achieved when the elements of control itself are completely met and in order for the control within the company. The method used in this paper is a qualitative method that is descriptive in nature and uses analysis with several data sources and theories that are used from several related sources: Based on the results of surveys and research by the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global, it shows that every year an average of 5% of the organization's income becomes a victim of fraud. One of them is the case of State-Owned Enterprises (BUMN) that committed fraud. Internal control at BUMN that is still not good at responding to corruption problems has resulted in fraud violations in BUMN. Because, this type of fraud is often not detected because of the people who work together to enjoy the benefits. As explained AFCE. Of course this is related to weak and indecisive internal controls on the perpetrators of corruption within the BUMN itself. Through this internal control, the management of the company can find out the extent to which the implementation of the company's effectiveness has been achieved, the problems that exist in the company as well as ways to overcome these problems. To prevent rampant fraud perpetrators in BUMN, SOEs must improve internal control by building a good internal control structure and improving organizational culture with the principles of fairness, transparency, creating effective supervision of employees and work units responsible for BUMN.*

**Keywords:** *Internal Control, Fraud Triangle, Corruption*

### ABSTRAK

Pengendalian intern merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan suatu perusahaan. Tujuan pengendalian intern dapat tercapai apabila unsur-unsur pengendalian itu sendiri terpenuhi secara lengkap dan tertibnya pengendalian dalam perusahaan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan beberapa sumber data dan teori yang digunakan dari beberapa sumber terkait: Berdasarkan hasil survey dan penelitian dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Secara global, terlihat bahwa setiap tahun rata-rata 5% pendapatan organisasi menjadi korban penipuan. Salah satunya adalah kasus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan kecurangan. Pengendalian intern pada BUMN yang masih kurang baik dalam merespon permasalahan korupsi mengakibatkan terjadinya pelanggaran fraud pada BUMN. Sebab, penipuan jenis ini seringkali tidak terdeteksi karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk menikmati keuntungan. Seperti yang dijelaskan AFCE. Tentu hal ini terkait dengan lemah dan tidak tegasnya pengendalian internal terhadap para pelaku korupsi di lingkungan BUMN itu sendiri. Melalui pengendalian intern ini manajemen perusahaan dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan

efektivitas perusahaan telah tercapai, permasalahan yang ada pada perusahaan serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mencegah maraknya pelaku kecurangan di BUMN, BUMN harus meningkatkan pengendalian intern dengan membangun struktur pengendalian intern yang baik dan meningkatkan budaya organisasi dengan prinsip kewajaran, transparansi, menciptakan pengawasan yang efektif terhadap pegawai dan unit kerja penanggung jawab BUMN.

**Kata Kunci :** Pengendalian Intern, Fraud Triangle, Korupsi

## PENDAHULUAN

Pengendalian internal merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dari suatu perusahaan. Melalui pengendalian internal ini, pihak manajemen perusahaan dapat mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan efektivitas perusahaan telah tercapai, masalah-masalah yang ada dalam perusahaan juga cara-cara mengatasi masalah tersebut. Tujuan pengendalian internal dapat dicapai bila unsur-unsur pengendalian itu sendiri benar-benar dipenuhi dan agar pengendalian itu berjalan secara efektif, maka diperlukan suatu bagian tertentu yang mengawasi dan mengevaluasi keefektifan pengendalian internal dalam perusahaan. Kecurangan akuntansi telah mendapat banyak perhatian publik sebagai dinamika yang menjadi pusat perhatian para pelaku bisnis di dunia. Bahkan di Indonesia, kecurangan akuntansi sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Wilopo (2006), pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah memanipulasi, pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecenderungan menunjukkan adanya indikasi untuk melakukan tindakan yang mengarah adanya kecurangan atau penipuan. Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis (Soepardi, 2007).

Untuk menangani masalah kecurangan akuntansi, diperlukan monitoring, untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal yang efektif (Wilopo; 2006). Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil. Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan adanya pengendalian internal maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. Pengendalian internal yang kuat akan mampu menurunkan tingkat kecendrungan kecurangan akuntansi, jika pengendalian internalnya lemah maka kecendrungan kecurangan akuntansi semakin besar.

## Rumusan Masalah

*American institute of Certified Public Accountant* (2009) menjelaskan bahwa pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Coram et al. (2008) menjelaskan bahwa organisasi yang

memiliki fungsi internal audit akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi. Peranan auditor dalam mengurangi faktor kesempatan (opportunity) dalam kecurangan akuntansi. Agar sistem pengendalian internal dapat berfungsi dengan baik maka diperlukan elemen pengendalian internal. Pengendalian internal yang kuat akan mampu menurunkan tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi, jika pengendalian internalnya lemah maka kecenderungan kecurangan akuntansi semakin besar.

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui mengenai pengendalian internal
2. Mengetahui mengenai fraud triangle
3. Mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap fraud triangle
4. Mengetahui fraud yang terjadi di Indonesia

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pengendalian Internal**

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengertian sistem pengendalian internal menurut Jason Scott (2014:226) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai.

Sistem pengendalian internal menurut IAPI (2011:319.2) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian sistem pengendalian internal menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan.

### **Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Mulyadi (2017:130) unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4 unsur, yaitu:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
- b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
- c. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat

dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

### **Komponen-Komponen Sistem Pengendalian Internal**

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:71) sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen utama sebagai berikut:

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian internal yang baik. Beberapa komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian internal adalah:

- a. Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Dalam perusahaan harus selalu ditanamkan etika di mana jika etika itu dilanggar itu merupakan penyimpangan.
- b. Filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang dipakai oleh manajemen, artinya di sini bahwa manajemen akan menegakkan peraturan. Jika yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas.
- c. Struktur Organisasi
  - 1) Metode pembagian tugas dan tanggungjawab
  - 2) Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia. Perusahaan dalam memilih karyawan harus selektif dan melalui prosedur tes yang semestinya bukan nepotisme dan sejenisnya.
  - 3) Pengaruh dari luar. Apabila lingkungan dalam perusahaan sudah baik, maka pengaruh dari luar yang buruk akan mudah bersama-sama ditangkal dan pengaruh yang baik akan lebih mudah di terima.

#### 2. Penaksiran Risiko

Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar.

#### 3. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan.

### ***Fraud***

Pusdiklatwas BPKP (2008:11) menjelaskan pengertian fraud dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam terminologi awam fraud lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, fraud pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lainlain.

Tugiman (2008:3) menjelaskan pengertian sebagai suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Menipu atau memberikan yang keliru untuk keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak fair, baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa fraud berarti bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar, apabila suatu kesalahan itu di sengaja, adalah fraud.

## Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)



Sumber: Core Accounting Indonesia-blogger

Segitiga Kecurangan adalah penggambaran 3 kondisi yang menjadi penyebab penyalahgunaan asset dan kecurangan di laporan keuangan.

### 1. *Pressure* (Tekanan)

Seseorang yang melakukan kecurangan bisa dikarenakan tuntutan gaya hidup, pengaruh lingkungan sekitarnya, dan yang paling mungkin adalah tuntutan ekonomi. Namun, alasan lain bisa kita bedakan menjadi penyebab internal dan penyebab eksternal. Penyebab internal adalah penyebab yang timbul di dalam pekerjaan pribadinya di kantor. Misalnya, banyak pekerjaan di kantor yang ia tangani namun tidak di beri upah lebih, lalu contoh lain ada tekanan dari atasan yang harus mengerjakan pekerjaan dengan cepat dan terus-terusan. Ini membuat ia merasa tidak adil dan melakukan kecurangan tersebut. Lalu penyebab eksternal, penyebab yang timbul di luar pekerjaan. Misal, ia sedang di lilit utang dan belum lagi kebutuhan ekonomi keluarganya yang setiap bulan bertambah. Lalu menyebabkan ia melakukan kecurangan.

### 2. *Rationalization* (Pembenaran)

Pembenaran merupakan sifat dari seseorang ini yang melakukan kecurangan. Ia berusaha mencari-cari alasan untuk membenarkan atas perbuatan curang yang ia lakukan. Pembeneran yang dilakukan oleh pelaku kecurangan :

- 1) Pelaku merasa adanya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar untuk dirinya sendiri dari kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Misalnya tempat ia bekerja mendapatkan keuntungan yang besar lalu, ia merasa tidak apa-apa jika dia mengambil sedikit dari keuntungan itu karena dia juga ikut andil dalam mendapatkan keuntungan itu.
- 2) Pelaku merasa benar atas perbuatan curangnya karena menurut ia gaji yang dia terima tidak sesuai dengan beban kerja yang dia lakukan. Sehingga jika ia mengambil sedikit keuntungan perusahaan ia merasa benar.

### 3. *Opportunity* (Kesempatan)

Kesempatan adalah situasi yang membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan kecurangannya. Ini terjadi karena kurangnya pengendalian internal perusahaan. Kecurangan disini tidak hanya berbentuk uang atau harta, namun bias juga dalam hal kedisiplinan. Seorang karyawan yang datang terlambat tanpa di ketahui oleh atasan atau orang lain juga merupakan perbuatan curang. Lalu kecurangan dalam bentuk uang atau harta adalah pelaku memanipulasi pekerjaan audit di karenakan kurangnya pengawasan dari pihak internal. Ada kesempatan, maka pelaku melakukan aksi curangnya. Oleh karena itu, pihak internal perusahaan harus senantiasa mengawasi setiap kegiatan yang ada di perusahaan. Selain itu SOP perusahaan juga harus terus di perbaiki dari waktu ke

waktu agar kesempatan ini berkurang atau bisa jadi tidak ada. Dan pelaku kecurangan kekurangan kesempatan untuk melakukan aksi curangnya.

Berdasarkan the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Fraud merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain. Aktivitas itu bisa dilakukan oleh oknum dari dalam atau luar perusahaan. Tujuannya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

ACFE membagi fraud dalam tiga jenis perbuatan, yaitu:

1. *Aset Misappropriation*

Fraud ini didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau pencurian aset dan harta perusahaan atau pihak lain yang terkait perusahaan. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur.

2. *Fraudulent Statements*

Tindak kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Caranya, dengan merekayasa data transaksi atau laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

3. *Corruption*

Tindakan ini banyak terjadi di negara-negara yang penegakan hukumnya masih lemah dan tata kelola belum baik. Fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para oknum bekerja sama menikmati keuntungan. Hal itu termasuk menyalahgunakan wewenang, penyuapan, penerimaan yang tidak sah, dan pemerasan secara ekonomi.

## METODOLOGI PENELITIAN

Data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif (Kuncoro, 2004:25).

1. Data Kuantitatif (berbentuk angka)

Merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau yang terjadi dilapangan yang diperoleh dari teknik wawancara, kemudian akan diolah oleh penulis, seperti : wawancara dengan staf bagian gudang dan bagian penjualan.

2. Data Kualitatif (berbentuk kata-kata/kalimat)

Merupakan data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi, seperti: struktur organisasi, laporan pembelian, persediaan dan laporan penjualan.

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis dengan beberapa sumber data dan teori yang di pakai dari beberapa sumber terkait.

Ada pun yang menjadi sumber data pada makalah ini adalah data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder diperoleh dari perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan hasil survei dan penelitian Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global menunjukkan bahwa setiap tahun rerata 5 persen dari pendapatan organisasi menjadi korban fraud. Makalah ini mengambil informasi terkait fraud di Indonesia berdasarkan hasil survey ACFE yang di pilih adalah kasus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan fraud.

Berdasarkan hasil survei dan penelitian Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global menunjukkan bahwa setiap tahun rerata 5 persen dari pendapatan organisasi menjadi korban fraud. Makalah ini mengambil informasi terkait fraud di Indonesia berdasarkan hasil survey ACFE yang di pilih adalah kasus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan fraud.

Data yang diolha dari makalah ini adalah berdasarkan dari beberapa info media yaitu dari berita yang terbaru dengan situs berita yang resmi. penelitian ini memakai studi dokumen dimana pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dalam hal ini memaki dokumen sekunder yaitu dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Fraud* BUMN**

Secara umum BUMN atau badan usaha milik negara yaitu badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan dikuasai oleh negara. Negara dalam hal ini khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Badan usaha milik negara juga ada yang dalam bentuk usaha nirlaba.

Tujuan berdirinya badan usaha milik negara berbasis nirlaba ini adalah menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Badan usaha milik negara hadir sebagai perwujudan pemerintah dalam berperan sebagai pelaku ekonomi. Selain itu soal permodalan badan usaha milik negara, baik sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

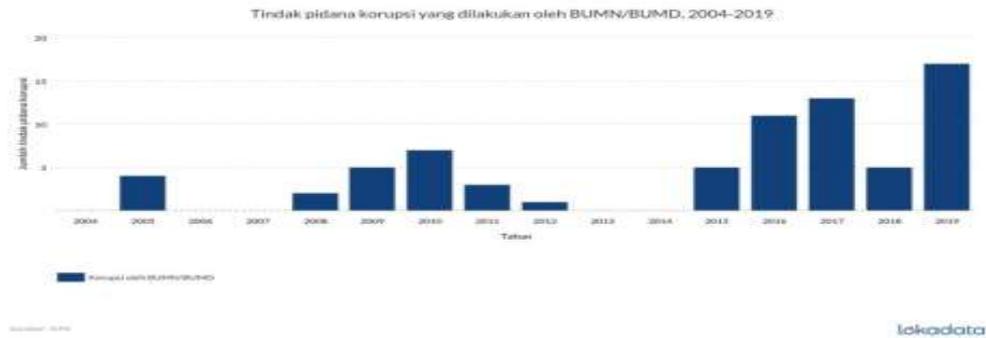
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sada bukan demi mencari untung, melainkan memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat tanpa perlu bergantung ke perusahaan asing. Di dalam situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perusahaan swasta bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak terlepas dari risiko fraud. Hal itu terlihat dari kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat BUMN meningkat. Pada akhirnya, pengendalian fraud menjadi tanggung jawab perusahaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik korupsi di PT Waskita Karya (Persero). Lembaga anti rasuah menjumpai praktik pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif pada sejumlah proyek yang dikerjakan Divisi III/Sipil/II PT.Waskita Karya selama 2009 sampai dengan 2015.

Sebelumnya di awal tahun masyarakat dikejutkan dengan kasus mega skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya Tbk (Persero). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memprediksi, korupsi di asuransi pelat merah tersebut merugikan negara mencapai Rp17 triliun. Kemudian, berlanjut pengungkapan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas ke PT. Evio Sekuritas tahun 2014-2015.

Kasus bermula ketika Danareksa memberikan pembiayaan Rp. 105 miliar dengan cara melawan hukum, yaitu melakukan repo alias gadai, dengan jaminan saham PT. Sekawan Intipratma Tbk (SIAP) yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ada aliran dana dalam kasus korupsi terkait penjualan dan pemasaran pesawat PT Dirgantara Indonesia (PT. DI) kepada Direktur Utama PT. PAL Indonesia (Persero) Budiman Saleh. Pada kasus ini, KPK menyebut, Negara telah dirugikan hingga Rp. 330 miliar.

**Gambar 2**  
**Grafik Tingkat Korupsi BUMN**



Jika di tahun itu baru terungkap 4 kasus, berarti setidaknya masih ada 49 kasus lagi yang masih dalam penyelidikan atau belum terungkap. Data tersebut membuktikan bahwa *fraud* yang terjadi di BUMN adalah dalam hal korupsi, yang dilakukan oleh pihak internal dalam BUMN itu sendiri.

AFCE sendiri telah membagi fraud dalam tiga jenis dan salah satunya adalah *corruption*. Dimana tindakan ini terjadi karena hukum yang lemah dan tata kelola belum baik. Tata kelola yang dimaksud adalah tata kelola dari dalam, yaitu pada pengendalian internalnya yang masih belum baik dalam menyikapi masalah korupsi itu. Karena, fraud jenis ini seringkali tidak terdeteksi karena pada oknum yang bekerja sama dalam menikmati keuntungan. Sebagaimana yang telah dijelaskan AFCE. Tentunya ini berkaitan dengan pengendalian internal yang lemah dan tidak tegas pada pelaku korupsi di dalam lingkup BUMN itu sendiri.

### **Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Fraud Triangle**

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Adalah Fraud kejahatan ekonomi yang melibatkan jenis tipu daya, penipuan atau kebohongan. Penipuan melibatkan manipulasi atau distorsi informasi oleh pejabat publik. Penipuan terjadi ketika pejabat pemerintah mendapatkan tanggungjawab untuk melaksanakan perintah. Memanipulasi aliran informasi untuk keuntungan pribadi. Korupsi masuk didalam fraud triangle pada bagian *opportunity*, kesempatan yang di ambil untuk mengambil keuntungan dalam lemahnya pengawasan pengendalian internal suatu perusahaan atau organisasi.

Sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan. Juga seluruh pegawai di lingkungan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil survey dan penelitian ACFE Global menunjukkan bahwa setiap tahun rerata 5 persen dari pendapatan organisasi menjadi korban fraud. Guna menguatkan budaya anti-fraud di perusahaan, maka perlu beberapa program antara lain, penguatas kode etik, peningkatan kesadaran terhadap aktivitas fraud, sikap pemimpin dan sosialisasi anti fraud, baik kepada internal maupun eksternal perusahaan. Tak hanya itu, untuk menangkal tindak kecurangan laporan keuangan dan memudahkan pengungkapan aktivitas terindikasi korupsi, organisasi bisnis juga perlu merancang sistem pengendalian risiko fraud secara spesifik. Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:

1. Pengendalian intern tidak ada atau lemah dilakukan dengan longgara dan tidak efektif.
2. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
3. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.
4. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan itu tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
6. Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan.

Tindakan korupsi ini bukan tidak bisa diminimalkan dan dicegah. COSO: 1992 menjelaskan pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personae lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk kecurangan yang mungkin terjadi dapat dicegah dengan cara berikut:

- a. Membangun struktur pengendalian intern yang baik. Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan.
- b. Mengefektifkan aktivitas pengendalian. Review Kinerja Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan.
- c. Pengolahan informasi. Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*).
- d. Pengendalian fisik. Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program computer dan data files; dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.
- e. Pemisahan tugas. Pembebanan tanggungjawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.
- f. Meningkatkan kultur organisasi. Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Menurut Saifuddin Hasan, 2000, prinsip-prinsip dasar tersebut adalah:
  1. Keadilan (*Faimess*)  
Melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. **Transparansi**  
Keterbukaan (*disclosure*) bagi stakeholder yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan/pengelolaan suatu perusahaan. Dalam hal ini terkait pula kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi material kepada pemegang saham /publik dan pemerintah secara benar, akurat, teratur dan tepat waktu.
3. **Akuntabilitas (*Accountability*)**  
Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham dan pengawas. Di sini menyangkut pula proses pertanggungjawaban para pengurus perusahaan atas keputusan - keputusan yang dibuat dan kinerja yang dicapai.
4. **Akuntabilitas (*Accountability*)**  
Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham dan pengawas. Di sini menyangkut pula proses pertanggungjawaban para pengurus perusahaan atas keputusan - keputusan yang dibuat dan kinerja yang dicapai.
5. **Moralitas**  
Manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung tinggi moralitas, di dalam prinsip ini terkandung unsur-unsur kejujuran, kepekaan sosial dan tanggung jawab individu.
6. **Kehandalan (*Reliability*)**  
Pihak manajemen/pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan.
- g. **Komitmen.** Pihak manajemen/pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan, dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai pemegang sahamnya (*duty of loyalty*) serta menurunkan risiko perusahaan.
- h. **Mengefektifkan fungsi internal audit.** Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pengendalian internal merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dari suatu perusahaan. Melalui pengendalian internal ini, pihak manajemen perusahaan dapat mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan efektivitas perusahaan telah tercapai, masalah-masalah yang ada dalam perusahaan juga cara-cara mengatasi masalah tersebut. Korupsi masuk didalam *fraud triangle* pada bagian *opportunity*, kesempatan yang di ambil untuk mengambil keuntungan dalam lemahnya pengawasan pengendalian internal suatu perusahaan atau organisasi. Untuk lebih meminimalisir tindak korupsi yang menguntungkan diri sendiri atau pun kelompok, maka pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya tindakan tersebut. Pengendalian internal yang kuat akan mampu menurunkan tingkat kecenderungan kecurangan, jika pengendalian internalnya lemah maka kecenderungan kecurangan akuntansi semakin besar. Oleh karena itu pengendalian internal yang baik dapat pula mencegah terjadinya *fraud triangle*.

## Saran

Untuk mencegah maraknya pelaku fraud di BUMN, maka pihak BUMN harus meningkatkan pengendalian internal dengan membangun struktur pengendalian intern yang baik dan meningkatkan kultur organisasi dengan prinsi keadilan, transparansi, menciptakan pengawasan yang efektif terhadap karyawan dan unit kerja yang bertanggung jawab di dalam BUMN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Habil Putra. 2018. *Peran Auditor Internal Dalam Pencegahan Kecurangan Akuntansi* [https://wikipajak.com/peran-auditor-internal-dalam-pencegahan-kecurangan-akuntansi/#:~:text=Pengendalian%20intenal%20yang%20kuat%20akan,Keandalan%20informasi%20keuangan.\(diakses 10 Desember 2020\)](https://wikipajak.com/peran-auditor-internal-dalam-pencegahan-kecurangan-akuntansi/#:~:text=Pengendalian%20intenal%20yang%20kuat%20akan,Keandalan%20informasi%20keuangan.(diakses%2010%20Desember%202020))
- Ayunda. 2020. Apa Itu BUMN? Berikut Pengertian, Fungsi, Ciri Dan Contohnya <https://accurate.id/marketing-manajemen/apa-itu-bumn/> (diakses 13 Januari 2021)
- Dosen, Pendidikan. 2015. *Sistem Pengendalian Internal* <https://www.dosenpendidikan.co.id/sistem-pengendalian-intern/> (diakses 10 Desember 2020)
- Firmansyah, Luky Maulana. 2020. *Baru 4 terungkap, daftar kasus korupsi BUMN masih panjang.* <https://lokadata.id/artikel/baru-4-terungkap-daftar-kasus-korupsi-bumn-masih-panjang>
- Hidayat, Faiq. 2020. *Kasus Suap Antar-BUMN, Eks Dirut PT. Inti Dituntut 3 Tahun Bui.* <https://news.detik.com/berita/d-4902489/kasus-suap-antar-bumn-eks-dirut-pt-inti-dituntut-3-tahun-bui> (diakses 10 Desember 2020)
- Makalah, Pendidikan. 2017. *Contoh Makalah yang Baik dan Benar [Update]* <https://www.mediamaya.net/contoh-makalah-yang-baik-dan-benar/> (diakses 10 Desember 2020)
- Nurhayat, Wiji. 2020. *Kenali Fraud Laporan Keuangan dan Praktiknya yang Merugikan Perusahaan* <https://www.jurnal.id/id/blog/kenali-fraud-laporan-keuangan-dan-praktik-yang-merugikan-perusahaan/> (diakses 10 Desember 2020)
- Ramadhan, Ardito Galih, Bayu. 2019. *5 Fakta Kasus Dugaan Suap Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II* <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/02/10220591/5-fakta-kasus-dugaan-suap-direktur-keuangan-pt-angkasa-pura-ii?page=all> (diakses 10 Desember 2020)
- Universitas Indoensia. 2018. *Landasan Teori* <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10766/BAB%20II.pdf?sequence=10&isAllowed=y> (diakses 10 Desember 2020)